

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU



Oleh :

ATHAYA ZHAFIRAH

185310147

**PROGAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

ATHAYA ZHAFIRAH

185310147

**PROGAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



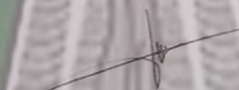
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Athaya Zhafirah
NPM : 185310147
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Riau

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI




Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Athaya Zhafirah
NPM : 185310117
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Riau.

Disetujui Oleh

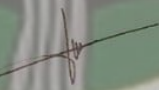
Tim Penguji

1. Burhanudin, SE, M.Si
2. Yolanda Pratami, S.E., M.Ak

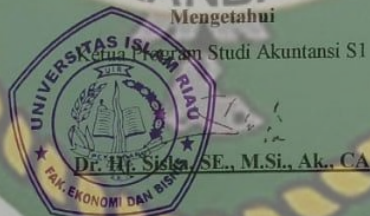
Tanda Tangan

()
()

Pembimbing


Dina Hidayat, SE, M.Si, Ak., CA
Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kodé Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310147
 Nama Mahasiswa : ATHAYA ZHAFIRAH
 Dosen Pembimbing : I. DINA HIDAYAT SE., M.Si. Ak., CA
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : ANALYSIS OF VALUE FOR MONEY IN PERFORMANCE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY REPORT DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
 Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 15 November 2021	Persiapan proposal	Sudah disiapkan bab I-III	
2	Senin, 3 Januari 2022	Bab I-III	Perbaiki bab I-III	
3	Rabu, 19 Januari 2022	Bab I-III	Perbaiki bab I-III	
4	Rabu, 2 Februari 2022	Bab I-III	ACC seminar proposal	
5	Selasa, 24 Mei 2022	Bab IV-V	Perbaiki pembahasan	
6	Senin, 30 Mei 2022	Bab IV-V	Perbaiki pembahasan	
7	Selasa, 7 Juni 2022	Bab IV-V	Perbaiki abstrak dan pembahasan	
8	Minggu, 19 Juni 2022	Bab IV-V	ACC Seminar hasil	

Pekanbaru, 20 Juni 2022
 Wakil Dekan I



MTG1MZEWMQ3



(Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan koplinnya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 666/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Maka pada Hari Kamis 30 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Athaya Zhafirah |
| 2. N.P.M | : 185310147 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Sosial Provinsi Riau. |
| 5. Tanggal ujian | : 30 Juni 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 75,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak

(.....)

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Kuisa No. : 510/A-UIR/5-FEB/2022

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 666 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

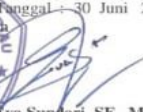
- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Athaya Zhafirah
N P M : 185310147
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Sosial Provinsi Riau.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

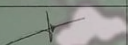
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Athaya Zhafirah
 NPM : 185310147
 Jurusan : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Sosial Provinsi Riau.
 Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 74,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 30 Juni 2022
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Athaya Zhafirah
NPM : 185310147
Judul Proposal : Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Sosial Provinsi Riau.
Pembimbing : I. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 09 Februari 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Efi Susanti, SE., M.Acc	Anggota	2. 
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3. 

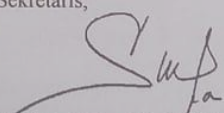
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 09 Februari 2022
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor: 974/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca :** Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-09-27 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang :** Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Rangkaian Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.	Asisten Ahli	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :

N a m a : Athaya Zhafrah

N P M : 185310147

Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi S1

Judul Skripsi : Analisis Value For Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Social Provinsi Riau

3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UJR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada tanggal: 28 September 2021



Dina Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Merpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eoo.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ATHAYA ZHAFIRAH
NPM : 185310147
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 23 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekbaru, 16 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 30 Juni 2022
Yang memberikan pernyataan



Athaya Zhafirah
NPM: 185310147

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah, yaitu Dinas Sosial Provinsi Riau untuk tahun 2019 dan 2020 menggunakan konsep *value for money*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2019 dan tahun 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau ditinjau dari rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas belum memenuhi prinsip *value for money* karena beberapa rasio belum mencapai rasio yang maksimal. Pada tahun 2019 perhitungan ekonomis sebesar 76,65% dinyatakan ekonomis, perhitungan efisiensi sebesar 114,22% dinyatakan efisien, perhitungan efektivitas sebesar 59,94% dinyatakan tidak efektif. Pada tahun 2020 perhitungan ekonomis sebesar 95,98% dinyatakan ekonomis, perhitungan efisiensi sebesar 103,84% dinyatakan efisien, perhitungan efektivitas sebesar 45,65% dinyatakan tidak efektif. Maka Kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dinyatakan belum memenuhi prinsip *value for money*.

Kata Kunci : ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, *value for money*, kinerja

ABSTRACT

The purpose of this study is to measure the level of performance of government agencies, Dinas Sosial Provinsi Riau for 2019 and 2020 using the concept of value for money. This type of research is qualitative research. The data used is primary data and secondary data in the form of interviews and Performance Reports of Government Agencies of Dinas Sosial Provinsi Riau in 2019 and 2020.

The results of this study indicate that the performance of Dinas Sosial Provinsi Riau in terms of economic ratios, efficiency and effectiveness has not met the value for money principle because some ratios have not reached the maximum ratio. In 2019 the economic calculation of 76.65% was declared economical, the efficiency calculation of 114.22% was declared efficient, the effectiveness calculation of 59.94% was declared ineffective. In 2020 the economic calculation is 95.98% declared economical, the calculation of efficiency of 103.84% declared efficient, the calculation of effectiveness of 45.65% declared ineffective. So the performance of Dinas Sosial Provinsi Riau in 2019 and 2020 is declared to have not met the value for money principle.

Keywords: economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, karena dengan rahmat, dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Riau.”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Eridal dan Ibunda Erdawati serta abang dan kakak juga keluarga besar lainnya atas segala kasih sayang, motivasi, semangat, bantuan moril dan materi serta doa yang diberikan setiap langkah penulis dalam menyusun skripsi
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

5. Ibu Nina Nursida, SE.,M.Acc selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Ibu Eny Wahyuningsih, Dra, M.si., Ak.CA selaku Dosen PA penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7. Ibu Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, Terimakasih karena telah memberikan saran, masukan, kritik, tenaga serta pikiran untuk bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
8. Bapak dan ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis berguna dikemudian hari dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
9. Kepada Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk dan Staff Subbagian Perencanaan Program Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pengambilan data sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik.
10. Kepada teman-teman saya Yunda, Iin, Cici, Mutia, Jab, Gomok, Icil, Vivi dan lain lain yang selalu memberikan saran, semangat serta motivasi bagi penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, apabila dalam penyusunan ini terdapat kesalahan kata yang tidak

berkenan, maka penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada pembaca. Untuk itu penulis selalu akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT, semoga pengorbanan dan keikhlasan serta dukungan yang diberikan kepada penulis akan diberikan balasan yang berlipat ganda dan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 9 Juli 2022

Penulis

ATHAYA ZHAFIRAH



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	14
2.1 Telaah Pustaka.....	14
2.1.1 Organisasi Sektor Publik.....	14
2.1.1.1 Pengertian Organisasi.....	14
2.1.1.2 Pengertian Sektor Publik.....	14
2.1.1.3 Pengertian Organisasi Sektor Publik.....	15
2.1.2 Penganggaran Sektor Publik	15
2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	15
2.1.2.2 Tujuan Anggaran Sektor Publik.....	16
2.1.2.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor publik	17
2.1.1.4 Anggaran <i>Value For Money</i>	18
2.1.3 Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	20
2.1.3.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	20
2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	21
2.1.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja	22
2.1.4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22
2.1.5 <i>Value For Money</i>	23
2.1.5.1 Pengertian <i>Value For Money</i>	23
2.1.5.2 Indikator <i>Value For Money</i>	24

2.1.6	Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i>	25
2.1.6.1	Pengukuran Ekonomi	25
2.1.6.2	Pengukuran Efisiensi.....	26
2.1.6.3	Pengukuran Efektivitas	27
2.1.6.4	Implementasi Konsep <i>Value For Money</i>	28
2.2	Hipotesis	29
BAB III	METODE PENELITIAN	30
3.1	Desain Penelitian	30
3.2	Objek Penelitian	31
3.3	Definisi Operasional Variabel	31
3.3.1	<i>Value For Money</i>	31
3.4	Jenis dan sumber data	34
3.4.1	Jenis Data	34
3.4.2	Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.1.1	Kedudukan Dinas Sosial Provinsi Riau	36
4.1.2	Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau	37
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau	38
4.1.4	Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Riau	45
4.1.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2020	45
4.1.6	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau	46
4.1.7	Strategi Dinas Sosial Provinsi riau.....	47
4.2	Hasil Penelitian.....	47
4.2.1	Ekonomi	48
4.2.2	Efisiensi.....	58
4.2.3	Efektivitas	68
4.3	Pembahasan	70
4.3.1	Ekonomis	70
4.3.2	Efisiensi.....	71
4.3.3	Efektivitas	73
4.3.4	Hasil Pembahasan	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Value For Money</i>	22
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2020	7
Tabel 2.1	Persentase Penilaian Ekonomis	24
Tabel 2.2	Persentase Penilaian Efisiensi	25
Tabel 2.3	Persentase Penilaian Efektivitas	26
Tabel 4.1	Daftar Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2019	42
Tabel 4.2	Daftar Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2020	42
Tabel 4.3	Jumlah Jabatan Fungsional Per Desember 2019	42
Tabel 4.4	Jumlah Jabatan Fungsional Per Desember 2020	42
Tabel 4.5	Perjanjian Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019-2020.....	44
Tabel 4.6	Perhitungan Ekonomis Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019	46
Tabel 4.7	Perhitungan Ekonomis Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020	53
Tabel 4.8	Perhitungan Efisiensi Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019	57
Tabel 4.9	Perhitungan Efisiensi Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020	63
Tabel 4.10	Perhitungan Efektivitas Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019	66
Tabel 4.11	Perhitungan Efektivitas Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020	67

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Belanja Langsung Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019
- Lampiran 2 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Belanja Langsung Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020
- Lampiran 3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dan 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor Publik merupakan sektor yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat oleh sebab itu sektor publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya (Hidayah, 2017:1). Organisasi yang dikatakan baik dalam pengelolaannya, dapat dilihat dari bagaimana kinerjanya. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat menjadi tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya kebutuhan masyarakat harus bisa terlayani dengan baik dengan tetap memperhatikan dan menjalankan proses secara benar (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah memberikan informasi kepada publik yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2015:9).

Kinerja merupakan hasil nyata suatu instansi atau organisasi baik dari kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran yang sudah disepakati sebelumnya. Artinya, kinerja dapat dikatakan berhasil jika suatu organisasi memiliki kriteria keberhasilan atau tolak ukur kinerja berupa target yang hendak dicapai. Untuk menentukan tolak ukur kinerja yang sesuai maka diperlukannya sistem pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu organisasi berfokus pada sasaran yang sudah ditetapkan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja instansi pemerintah

kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Sedangkan Menurut Rahmadan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah. Dari laporan kinerja ini, masyarakat sebagai pengguna informasi publik dapat mengetahui secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja satu instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 merupakan dampak dari perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dimaksud sebagai media informasi sekaligus bentuk akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

Mardiasmo (2018:165) mengatakan *Value For Money* ialah inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah saat melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya menentukan *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berwujud. *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penelitian tentang *Value For Money* sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Ritonga, (2021) yang berjudul, Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019. Hasil Penelitian ini menunjukkan pada periode 2018-2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dari rasio ekonomis keseluruhan dinilai ekonomis. Dari rasio efisiensi, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sudah dilaksanakan secara efisien. Dari segi efektivitas pada tahun 2018-2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dinilai tidak efektif

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Della Fadilla (2021) yang berjudul, Analisis *Value For Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019 dinilai ekonomis. Dari segi efisiensi Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019 dinilai kurang efisien, sedangkan dari segi efektivitas Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019 dilaksanakan secara efektif.

Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Felia Putri (2021), yang berjudul Analisis *Value For Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau periode Tahun 2018-2019. Hasil penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menunjukkan bahwa rasio ekonomi dari tahun 2018-2019 kinerja keuangan bersifat ekonomis. Tingkat efisiensi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 dinilai efisien, dan dari segi efektivitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 juga dinilai efektif.

Penelitian ini meneliti kembali tentang konsep *value for money* pada Dinas Sosial Provinsi Riau. Perbandingan penelitian kali ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian kali ini meneliti sebuah objek yaitu Dinas Sosial Provinsi Riau sedangkan di penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian *value for money* pada objek ini. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu pada tahun periode dilakukannya penelitian tersebut atau periode terbaru. Pada penelitian terdahulu ada beberapa permasalahan dalam pengukuran kinerja LAKIP salah satunya pelaksanaan program yang masih berorientasi pada output daripada outcome. Hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari

pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan konsep *value for money* yang mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan dalam organisasi sektor publik. Maka dari itu peneliti mengambil objek penelitian di Dinas Sosial Provinsi Riau karena selain belum pernah diteliti, ada beberapa program dari penyerapan dana yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dengan hal itu peneliti ingin membandingkannya dengan penelitian terdahulu dengan menerapkan konsep *value for money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Riau. Dinas Sosial Provinsi Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi yang mengelola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Povinsi Riau, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala UPTD Pada Dinas Sosial Provinsi Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai 2 sasaran strategis yang terdiri dari sasaran strategis eksternal dan sasaran strategis internal.

Sasaran Strategis Eksternal adalah sasaran strategis yang pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Riau No. 113 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2016 yang mencantumkan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Kantor, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan, Program Pelayanan Sosial Melalui Panti, Program Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS, Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta Perlindungan Sosial,

Program Pengembangan Data/Informasi, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran strategis internal adalah sasaran strategis yang pelaksanaannya untuk ketersediaan sarana prasarana, pencapaian kinerja instansi dan penguatan kapasitas dan kualitas pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau.

Berikut anggaran dan realisasi untuk masing-masing program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1.1
Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rupiah)

NO	PROGRAM	2019	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor	4.302.347.200	3.775.383.608
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	824.851.800	486.762.000
3	Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	7.049.788.600	5.398.820.007
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	845.260.200	558.383.900
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	954.295.200	907.936.000
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.000.000	0
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	894.093.000	817.330.740
8	Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	1.547.338.200	642.431.050
9	Program Pengembangan Data/Informasi	164.998.000	134.408.100

10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000	17.500.000
TOTAL		16.618.972.200	12.738.955.405

NO	KEGIATAN	2020	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor	3.077.865.501	3.024.156.439
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.675.000	136.123.325
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	41.895.000
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	285.996.000	284.937.000
5	Program Rehabilitasi Sosial	5.128.038.763	4.958.283.060
6	Program Pemberdayaan Sosial	456.129.265	315.152.300
7	Program Penanganan Fakir Miskin	50.000.000	48.620.000
TOTAL		9.177.704.529	8.809.167.124

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau periode 2019-2020, realisasi pengeluaran keuangan untuk masing-masing dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau selama periode ini lebih kecil dari target yang dianggarkan. Pada tahun 2019 terdapat 10 program yang dijalankan Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu, Program Pelayanan Administrasi Kantor, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan, Program Pelayanan Sosial Melalui Panti, Program Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS, Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta Perlindungan Sosial, Program Pengembangan Data/Informasi, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Sedangkan pada tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Riau hanya menjalankan 7 program yaitu,

Program Pelayanan Administrasi Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Penanganan Fakir Miskin.

Pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat realisasi yang penuh. Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pada tahun 2019 realisasi mencapai sebesar Rp 17.500.000,- dan pada tahun 2020 realisasi mencapai sebesar Rp 41.895.000,-. Sedangkan program yang memiliki realisasi anggaran terendah pada tahun 2019 adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dengan realisasi sebesar Rp 0,- dan pada tahun 2020 ialah Program Pemberdayaan Sosial dengan realisasi sebesar Rp 315.152.300,-. Dengan adanya program yang tidak tercapai targetnya pada tahun 2019 dan 2020 membuktikan bahwa anggaran Dinas Sosial Provinsi Riau belum terserap dengan optimal.

Realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 yang tidak mencapai target ini membuktikan anggaran belum terserap maksimal. Untuk melihat apakah pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Riau telah ekonomis, efektif dan efisien dibutuhkan pengukuran kinerja yaitu dengan cara mengukur kinerja keuangannya dengan menerapkan konsep *Value For Money*. Cara ini dibutuhkan agar pengeluaran bisa digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang telah dibuat, agar pengeluaran yang dimanfaatkan dapat memberikan output sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu keluhan masyarakat terhadap Dinas Sosial Provinsi Riau ialah bantuan langsung tunai yang kurang optimal, bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tidak tersalurkan secara menyeluruh karena ada beberapa keluhan dari masyarakat sekitar yang tidak menerima bantuan langsung tunai tersebut. Dilihat dari anggarannya pun Dinas Sosial Provinsi Riau tidak merealisasikan secara maksimal, karena adanya selisih anggaran yang jauh. Masyarakat berharap Dinas Sosial lebih berperan dalam penyaluran bantuan langsung tunai sehingga penyalurannya kepada masyarakat lebih efektif. Hal itu penting karena Dinas Sosial memiliki peran utama dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi ekonomis ?
2. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efisiensi ?

3. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efektivitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efisiensi.
3. Untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan:

1. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menerapkan teori akuntansi dan dapat berbagi ilmu pengetahuan yang berfokus dengan masalah konsep *Value For Money*.

2. Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Sosial Provinsi Riau tentang penilaian dan memberikan informasi rinci kepada masyarakat tentang program yang direncanakan pemerintah guna meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan anggaran program yang diberikan sesuai dengan perencanaan pemerintah.

3. Peneliti lainnya

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi acuan atau inspirasi untuk peneliti lain yang akan meneliti kasus yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara garis besar penulisan. Berdasarkan pada Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pengertian atau definisi yang diambil dari kutipan buku yang terkait dengan penyusunan proposal. Selanjutnya, berdasarkan telaah pustaka tersebut, akan dihasilkan

proposisi (pernyataan-pernyataan hipotetikal) yang biasa disebut dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, obyek penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2019 sampai 2020 agar pengelolaan data dapat diolah secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan yang berisikan jawaban permasalahan bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau, sedangkan dengan saran berisikan implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Organisasi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Organisasi

Menurut Mahsun (2016:13), organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama.

Schein (1992) dalam Lestari (2016), menyatakan organisasi adalah suatu usaha untuk mengkoordinasi kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsinya melalui tanggung jawab, organisasi terbentuk apabila suatu usaha memerlukan dari satu orang dalam menyelesaikan suatu kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dalam memenuhi suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

2.1.1.2 Pengertian Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Bastian (2019) menyatakan bahwa dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintah yang

besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas” yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Jadi, dapat disimpulkan sektor publik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum yang menghasilkan barang dan pelayanan publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum.

2.1.1.3 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Dinas sosial adalah salah satu bentuk organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mardiasmo (2018:23) organisasi sektor publik adalah organisasi yang bergerak dalam aspek lingkungan yang sangat kompleks, diantaranya mencakup faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

Menurut Nordiawan (2010) organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar.

2.1.2 Penganggaran Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran sektor publik ialah proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program-program atau aktivitas yang akan

dilaksanakan. Anggaran publik berisi rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*.

Anggaran dalam sektor publik disebut juga sebagai anggaran publik yang mengacu pada anggaran pemerintah dan APBD merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban untuk mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Halim dan Kusufi (2018:48) mengatakan bahwa anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk:

1. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya.
3. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Mengalokasikan dana pada berbagai macam program dan kegiatan yang telah disusun.

2.1.2.2 Tujuan Anggaran Sektor Publik

Menurut Khairunnisa (2021) Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk melayani dan mensejahterakan rakyat.

Beberapa karakteristik tujuan pokok dari adanya anggaran sektor publik yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- 3) Sekali disusun, anggaran hanya dapat dalam kondisi tertentu
- 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- 5) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor publik

Jenis anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi perkembangan pemerintahan sebuah negara. Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Anggaran Operasional (*Operation Recurrent Budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

- 2) Anggaran Modal (*Capital/Investment Budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.

- 3) Anggaran Pengesahan (*Tentative Anaced Budget*)

Anggaran ini dibagi kedalam anggaran tentatif dan anggaran *enaced*. Anggaran entatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya anggaran *enaced* adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

2.1.1.4 Anggaran *Value For Money*

Menurut Ekawan et al (2009), pemakaian anggaran untuk *value for money* dalam kegiatan organisasi swasta maupun pemerintah memiliki kelebihan dan kelemahan.

Adapun kelebihan penggunaan anggaran adalah:

- 1) Pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat pengukur prestasi suatu bagian atau individu didalam organisasi.

- 2) Pengelola/manajer dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh organisasi, apakah sudah ekonomis, efektif dan efisien.
- 3) Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi berbagai kegiatan organisasi.
- 4) Pemakaian anggaran dapat membantu manajemen/pengelola dalam pengambilan keputusan.
- 5) Pemakaian anggaran mengakibatkan anggaran timbulnya kesadaran tentang pentingnya biaya sebelum dana disediakan.
- 6) Implementasi anggaran dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan organisasi.
- 7) Penyusunan anggaran merupakan kekuatan manajemen/pengelola dalam menyusun perencanaan dimana manajemen/pengelola organisasi melihat kedepan untuk menentukan tujuan organisasi yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Sedangkan kelemahan penggunaan anggaran adalah:

- 1) Anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen/pengelola organisasi apabila semua pihak secara terus menerus berusaha berkoordinasi dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan didalam anggaran.
- 2) Anggaran didasarkan pada estimasi atas kegiatan yang akan datang, ketepatan estimasi sangat tergantung kepada pengalaman dan kemampuan estimator, dan ketidaktepatan anggaran berakibat tidak dapat dipakainya

anggaran sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dengan baik.

- 3) anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen/pengelola, tetapi anggaran oleh manajemen/organisasi perlu disadari sebagai alat untuk membantu manajemen/pengelola.
- 4) anggaran harus disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi.

2.1.3 Kinerja dan Pengukuran Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Sementara menurut Mahsun (2016:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Indonesia) atau GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan lainnya (Sipahelut, Murni, & Rate, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan gambaran yang menjelaskan keadaan keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan berdasarkan tujuan, standar dan syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setiap instansi atau perusahaan memiliki standar maupun kriteria tersendiri untuk menentukan apakah kinerja tersebut berhasil atau tidak. Jika kinerja tersebut berhasil melampaui standar kriteria yang ditentukan maka kinerja keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil.

Sedangkan jika kinerja keuangan dalam suatu instansi tidak berhasil mencapai kriteria yang sudah ditentukan maka perusahaan atau instansi tersebut telah gagal dalam mengupayakan kinerja keuangannya.

Menurut Halim dan Kusufi (2017:124) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan, berupa aktivitas, proyek, fungsi, atau kebijakan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (*output*), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*) (Sulisworo, 2009).

2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Sakinah (2020), tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*)
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi agar mencapai *good congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.1.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018:122) yaitu:

1. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
3. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
4. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
5. Untuk memonitor pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

2.1.4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menanggapi tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan amanah yang diterima instansi pemerintah tersebut. LAKIP juga merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian sebagai perwujudan *Good Governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. LAKIP bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah.

Menurut Agustin dan Subarjo (2017) fungsi LAKIP antara lain:

1. Untuk memuat kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran suatu tingkat pencapaian kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

2. Sebagai sarana hubungan kerja organisasi yang berfungsi menjadi wadah pengolahan informasi dan data.
3. Menjadi media informasi yang sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dan termasuk penerapan fungsi manajemen yang benar pada intansinya.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan amanah, sehingga dapat berfungsi menjadi laporan dari pimpinan unit organisasi.

2.1.5 Value For Money

2.1.5.1 Pengertian Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018:5) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga rasio utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Konsep yang mendasar pada tiga rasio utama, yaitu:

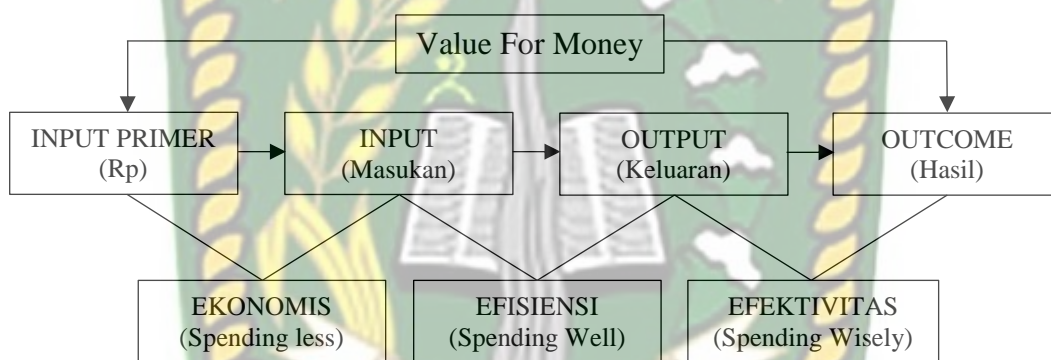
1. Ekonomis : pemerolehan *input* dengan mutu serta kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis ialah perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terikat dengan sepanjang mana organisasi sektor publik bisa meminimalisirs *input resource* yang digunakan ialah dengan menjauhi pengeluaran yang boros serta tidak produktif.
2. Efisiensi : pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu ataupun pengguna *input* yang terendah buat menggapai *output* tertentu.

Efisiensi ialah perbandingan *output/input* yang berhubungan dengan standar kinerja ataupun sasaran yang sudah diresmikan.

3. Efektivitas : tingkatan pencapaian hasil progam dengan sasaran yang diresmikan secara simpel daya guna ialah perbandingan *outcome* dengan *output*.

2.1.5.2 Indikator *Value For Money*

Gambar 2.1
Skema *Value For Money*



Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Mardiasmo (2018) mengungkapkan indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dilain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas yang dapat memberikan ukuran kinerja *bottom line* dalam sektor publik yang diidentikkan dengan pelayanan publik.

2.1.6 Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik (Mardiasmo, 2018). Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *ouput* dan *outcome* secara bersama-sama.

2.1.6.1 Pengukuran Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2018), Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk melihat sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Trilaksono & Handayani. 2020). Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya (Arifani, Salle, & Rante, 2018).

Berikut ini adalah formula untuk pengukuran ekonomi:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan program dan aktivitas.

Nilai *Input* : Anggaran

Nilai input adalah target anggaran yang merupakan perencanaan keuangan yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja.

Kriteria ekonomis menurut Mahsun (2016) adalah:

Tabel 2.1
Persentase Penilaian Ekonomis

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100%	Ekonomis
>100 %	Tidak Ekonomis
=100 %	Ekonomis Berimbang

2.1.6.2 Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018), Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Trilaksono & Handayani, 2020). Efisiensi artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal (Arifani, Salle, & Rante, 2018).

Berikut ini adalah formula untuk pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase capaian fisik dari program

Angka *output* yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh suatu instansi.

Input : Persentase keuangan program

Angka *input* yang dimaksud adalah presentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari suatu instansi.

Kriteria efisiensi menurut Mahsun (2016) adalah:

Tabel 2.2
Persentase Penilaian Efisiensi

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100 %	Tidak Efisien
> 100 %	Efisien
= 100 %	Efisien Berimbang

2.1.6.3 Pengukuran Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas merupakan perbandingan *outcome*, berupa pencapaian hasil program, dengan *output*, berupa target pencapaian yang telah ditetapkan (Trilaksono & Handayani. 2020). Efektivitas artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran (Arifani, Salle, & Rante, 2018).

Berikut ini adalah formula untuk pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian Kinerja

Angka *outcome* yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output : Target Kinerja

Angka *output* yang dimaksud adalah target sasaran dari program-program yang dilaksanakan oleh suatu instansi.

Kriteria efektif menurut Mahsun (2016) adalah:

Tabel 2.3
Persentase Penilaian Efektivitas

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
< 100 %	Tidak Efektif
> 100 %	Efektif
= 100 %	Efektif Berimbang

2.1.6.4 Implementasi Konsep *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018) dalam indrayani & Khairunnisa (2018), Penerapan konsep *Value For Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value For Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat), efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna). Manfaat lain dari implementasi konsep *Value For Money* menurut Mardiasmo (2018) antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah serta telaah pustaka diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau belum memenuhi prinsip rasio ekonomis.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau belum memenuhi prinsip rasio efisiensi.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau belum memenuhi prinsip rasio efektivitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2020:32) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi.

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui kinerja sistem keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Riau jika dilihat menggunakan konsep *Value for Money* serta mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu berupa data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) periode 2019-2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh lalu disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 239, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 *Value For Money*

Value For Money adalah metode untuk mengukur apakah sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan sudah mengelola kinerja keuangan dengan baik sesuai dengan 3 rasio dalam *Value For Money* yaitu Ekonomis, Efektivitas, dan Efisiensi. Berikut cara mengukur kinerja keuangan dengan metode *Value For Money* adalah:

a. Ekonomis

Menurut Mahsun (2016:186) kriteria ekonomis adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis atau sangat ekonomis.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis.

Cara mengukur tingkat ekonomis adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran

Angka *input* yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau

Nilai *Input* : Anggaran

Angka nilai *input* yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau.

b. Efisiensi

Efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisiensi menyangkut pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu (Purwiyanti, 2017).

Menurut Mahsun (2016:187) kriteria efisiensi adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisiensi berimbang atau cukup efisien.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efisien atau sangat efisien.

Cara mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase Realisasi Fisik dari Program

Angka *output* yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

Input : Persentase Realisasi Keuangan Program

Angka *input* yang dimaksud adalah persentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Dinas Sosial Provinsi Riau.

c. Efektivitas

Efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Menurut Mahsun (2016:187) kriteria efektivitas adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif.

Cara mengukur tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian sasaran

Angka *outcome* yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

Output : Target Sasaran

Angka *output* yang dimaksud adalah target sasaran dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data ini diperoleh langsung dari subjeknya yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau, namun masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut mengenai data target dan realisasi tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber informasi langsung yang berkaitan dalam penelitian berupa keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu hasil dari wawancara serta dokumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) periode 2019-2020, literatur, jurnal, buku, skripsi terdahulu serta sumber-sumber yang berkaitan dengan *Value for Money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari segala informasi yang diperlukan melalui dokumen, buku-buku, atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian, atau penemuan sebelumnya. Laporan yang diolah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020.

3.6 Teknik Analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode *Value For Money* dengan melihat 3 rasio, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Dari pengukuran rasio ini kemudian peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan lalu melakukan analisa dari hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi Riau sudah baik atau belum. Data-data untuk menghitung ketiga rasio ini didapat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Sosial Provinsi Riau merupakan dinas daerah yang berperan membantu menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wadah untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Provinsi Riau telah dibentuk sejak tahun 1961 dengan nama Jawatan Sosial, pada tahun 2000 Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No. 31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pergub Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau

4.1.1 Kedudukan Dinas Sosial Provinsi Riau

Dinas Sosial Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Dinas Sosial Provinsi Riau merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin dan di kepalai oleh Kepala Dinas

yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di Daerah, di Kota, maupun di Provinsi yang bergerak dibidang sosial seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 70 Tahun 2016 menetapkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai fungsi:

- i Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- ii Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- iii Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

- iv Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan
- v Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau

Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau. Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau terdiri atas:

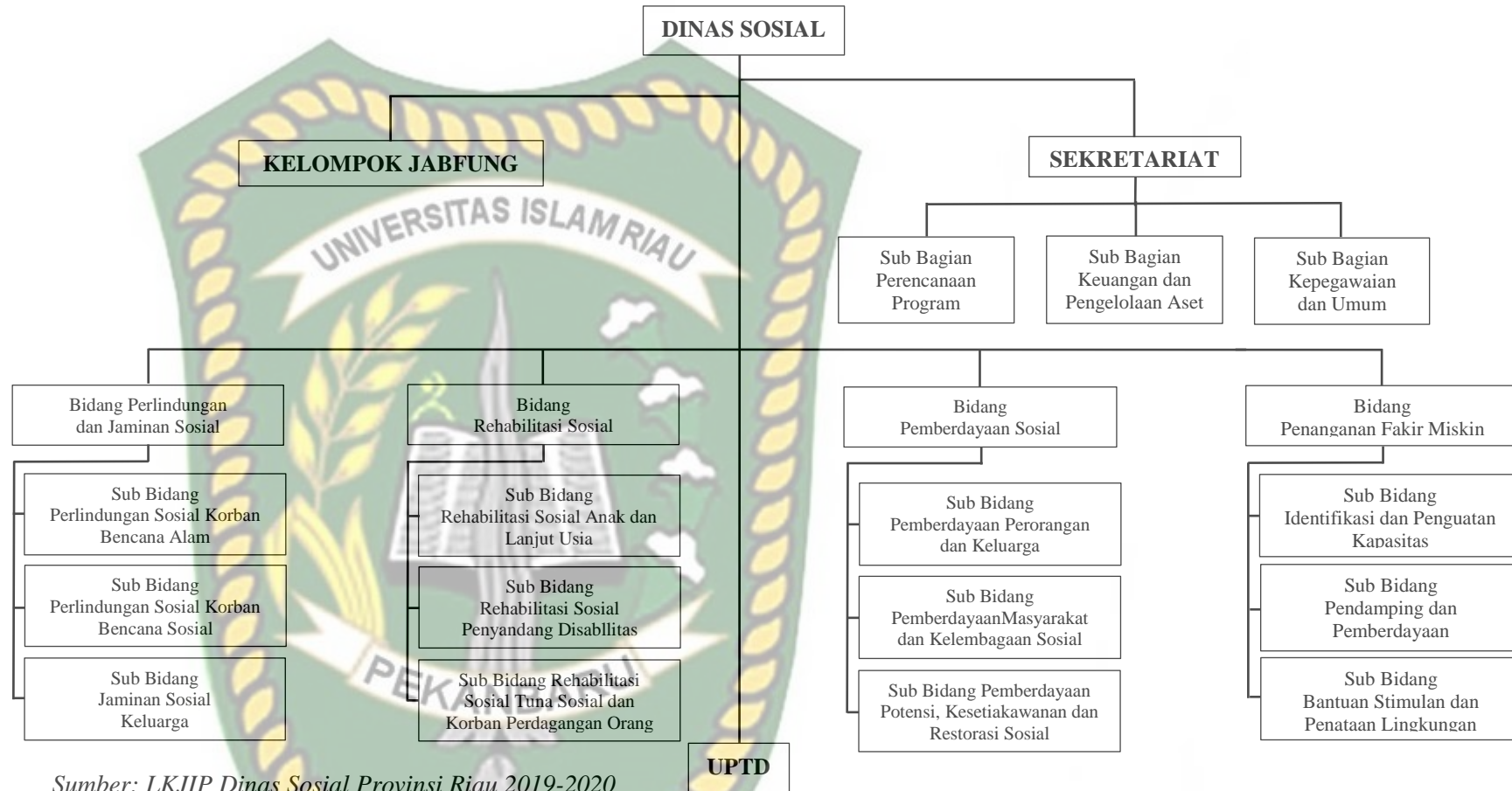
- 1) Kepala Dinas Sosial.
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan Program.
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
 - b. Subbagian Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
 - c. Subbagian Jaminan Sosial Keluarga.
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - a. Subbagian Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - b. Subbagian Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

- c. Subbagian Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 - a. Subbagian Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.
 - b. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
 - c. Subbagian Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - 6) Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 - a. Subbagian Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir Miskin.
 - b. Subbagian Pendampingan dan Pemberdayaan.
 - c. Subbagian Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 - 7) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
 - 8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Untuk lebih jelas mengenai Struktur Organisasi di Dinas Sosial Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

GAMBAR 4.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU



Sumber: LKIP Dinas Sosial Provinsi Riau 2019-2020

Berikut ini adalah uraian dari tugas masing-masing satuan unit organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Riau:

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Riau dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. Sekretaris menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga yang menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Rehabilitasi Sosial.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, Seksi

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Sosial.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir Miskin, Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan, Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berikut ini daftar pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019-2020:

Tabel 4.1
Daftar Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	
1	Laki-Laki	2	1	39	10	2	41	13	-	108
2	Perempuan	-	-	18	7	1	33	5	-	64
Total		2	1	57	17	3	74	18	-	172

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4.2
Daftar Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	
1	Laki-Laki	2	1	33	6	0	43	18	-	103
2	Perempuan	-	-	13	7	1	36	5	-	62
Total		2	1	46	13	1	79	23	-	165

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020

Berikut adalah jabatan fungsional tertentu pada tahun 2019-2020:

Tabel 4.3
Jumlah Jabatan Fungsional
Per Desember 2019

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Total
1	Penyuluh Sosial	1
2	Pekerja Sosial	4
3	Perencana	1
4	Arsiparis	2
Jumlah		8

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2019

Tabel 4.4
Jumlah Jabatan Fungsional
Per Desember 2020

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Total
1	Penyuluh Sosial	6
2	Pekerja Sosial	17
3	Perencana	2

4	Arsiparis	1
Jumlah		26

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Riau

1) Visi

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, melembaganya semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, serta pemantapan aparatur.

2) Misi

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
- 3) Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis melalui nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
- 4) Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS.
- 5) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 6) Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, perencanaan serta kerjasama program bidang sosial.

4.1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2019-2020:

Tabel 4.5
Perjanjian Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Rian	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	41.145 org
2	Peningkatan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	2.268 org

Sumber: LKJIP Dinas Sosial Provinsi Riau

4.1.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau

Adapun tujuan yang harus diwujudkan dari Dinas Sosial Provinsi Riau adalah: “Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau.”

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Sosial Provinsi Riau, sasaran misi yang akan dicapai ialah:

- 1) Peningkatan Pelayanan terhadap PMKS di Provinsi Riau.

- 2) Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Riau.

4.1.7 Strategi Dinas Sosial Provinsi Riau

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penyusunan strategi dalam mewujudkan pembangunan sosial Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya angka kemiskinan yang menggambarkan tingkat kemiskinan suatu daerah kabupaten/kota sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan serta menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan dapat dipertimbangkan sehingga program kegiatan bisa menjadi tepat guna, efektif, dan efisien.
- 2) Pendekatan pembangunan yang berbasis pada peningkatan kualitas SDM (*human skill*) dengan melihat data potensi sumber daya kesejahteraan sosial yang ada atau yang dapat dikembangkan sehingga mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat ekonomi, efisien dan efektif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019-2020. Berikut adalah hasil penelitian menurut *Value for Money*:

4.2.1 Ekonomi

Rasio ekonomis mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Dikatakan ekonomis jika semakin kecil nilai rasionya maka semakin ekonomis juga kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menggunakan anggaran yang ditetapkan.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input :

Realisasi Anggaran

Angka input yang dimaksud adalah angka realisasi anggaran yang dikeluarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau

Nilai *Input* :

Anggaran

Angka nilai *input* yang dimaksud adalah angka target anggaran atau pagu yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau.

Berikut ini ialah perhitungan rasio ekonomis pada Dinas Sosial Provinsi Riau periode 2019-2020:

Tabel 4.6
Perhitungan Ekonomis
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	570.000.000	473.977.208	83,15%

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.378.400	49.877.300	99,01%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	38.700.000	35.473.600	91,66%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	22.020.000	97,87%
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	60.000.000	53.595.000	89,33%
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	672.000.000	568.560.000	84,61%
	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	362.460.000	351.474.400	96,97%
	Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	11.917.800	8.385.700	70,36%
	Penyediaan Pelayanan Pameran Riau Expo	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	-	0%
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	904.665.600	714.412.900	78,97%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.000.000	101.999.500	100,00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	39.165.000	24.877.400	63,52%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.000.000	177.050.000	98,36%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	198.940.400	181.820.400	91,39%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah	250.000.000	222.550.000	89,02%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk	310.460.000	285.725.200	92,03%
	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	83.250.000	72.215.000	86,74%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Bina Laras	175.760.000	175.760.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak	249.450.000	237.610.000	95,25%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan sosial adopsi anak	37.585.000	24.415.000	64,96%
	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam Panti se Provinsi Riau	75.626.400	15.626.400	20,66%
	Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center	313.161.300	256.090.800	81,78%

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pemulung	134.360.100	17.077.800	12,71%
	Kemitraan dalam Penanganan Pasung	60.730.000	10.800.000	17,78%
	Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus	75.338.000	57.261.000	76,01%
	Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas	128.051.000	105.491.000	82,38%
Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik	1.402.052.000	1.294.592.000	92,34%
	Pelayanan Sosial Bagi Disabilitas pada Panti Disabilitas	923.004.000	380.349.800	41,21%
	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar melalui Panti	2.055.770.000	1.811.628.130	88,12%
	Pelayanan Sosial Bagi Anak Remaja Nakal di Upt Tengku Yuk	913.174.000	441.804.800	48,38%
	Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Terlantar melalui Panti	1.755.788.600	1.470.445.277	83,75%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Pengelolaan Data Fakir Miskin	49.674.000	35.739.000	71,95%
	Validasi Data Kartu KKS	70.236.000	69.390.700	98,80%
	Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin melalui Pembinaan Pendamping Sosial	175.900.800	25.706.000	14,61%
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan E-Waroeng Di Provinsi Riau	45.000.000	44.920.000	99,82%

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Kesetiakawanan sosial nasional EXPO dan HKSNI Provinsi	63.000.000	-	0%
	Pelayanan dan Penyantunan dan Janda Perintis Kemerdekaan	9.807.400	-	0%
	Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000	93.720.000	93,72%
	Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kab/Kota Se- Provinsi Riau	116.642.000	90.258.200	77,38%
	Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan	215.000.000	198.650.000	92,40%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	90.000.000	75.195.400	83,55%
	Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna	113.924.000	107.872.600	94,69%
	Penyuluhan Sosial Provinsi Riau	482.550.500	471.716.300	97,75%
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	93.266.600	89.486.600	95,95%
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial	174.554.100	163.665.100	93,76%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	18.000.000	-	0%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor	45.000.000	45.000.000	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	13.500.000	11.966.900	88,64%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	142.500.000	136.358.140	95,69%
	Penyediaan Sarana Kearsipan	36.000.000	35.750.000	99,31%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah	175.000.000	174.700.000	99,83%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk	76.226.000	75.993.000	99,69%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	18.000.000	18.000.000	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	96.768.000	96.401.500	99,62%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	53.318.400	27.621.200	51,80%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak	201.780.600	159.540.000	79,07%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Bina Laras	-	-	-

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan	204.376.000	152.146.000	74,44%
	Pelayanan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial	586.278.000	10.000.000	1,71%
	Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana	157.586.400	110.224.200	69,95%
	Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal	175.500.000	109.270.000	62,26%
	Pelayanan Sosial Rumah Singgah	26.880.000	26.480.000	98,51%
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	171.717.800	157.390.850	91,66%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	225.000.000	76.920.000	34,19%
Program Pengembangan Data/Informasi	Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi	164.998.000	134.408.100	81,46%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	18.000.000	17.500.000	97,22%
Ekonomis		16.618.972.200	12.738.955.405	76,65%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio ekonomis Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2019 adalah 76,65% dengan perhitungan terkecil sebesar 1,71% yaitu pada kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial dan Perhitungan terbesar adalah 100% yaitu pada kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyedia Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang

Lainnya UPT. Bina Laras, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor.

Peneliti juga mengukur perhitungan rasio ekonomis pada program atau kegiatan pada tahun 2020. Berikut ini adalah perhitungan rasio ekonomis pada program atau kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2020.

Tabel 4.7
Perhitungan Ekonomis
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.626.739	488.809.039	98,62%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	986.437.000	962.277.000	97,55%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.750.000	51.446.000	99,41%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	15.000.000	14.925.000	99,50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.975.000	24.967.000	99,97%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.000.000	42.000.000	100,00%
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	147.616.762	145.992.400	98,90%
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	676.300.000	667.900.000	98,76%
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	638.160.000	625.840.000	98,07%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	68.625.000	68.625.000
Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan		15.000.000	14.862.875	99,09%

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	54.050.000	52.635.450	97,38%	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	42.000.000	41.895.000	99,75%	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Daerah Provinsi	50.200.000	49.950.000	99,50%	
	Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana	-	-	-	
	Peningkatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Graduan Penerima Jaminan Sosial	-	-	-	
	Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal	235.796.000	234.987.000	99,66%	
	Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	-	-	-	
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	61.412.104	59.120.350	96,27%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Mental di Dalam Panti	991.895.000	974.583.000	98,25%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		1.502.618.800	1.392.984.510	92,70%	

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2.121.642.100	2.100.462.100	99,00%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Dalam Panti	100.000.000	86.744.000	86,74%
	Pelayanan Sosial bagi Anak Remaja Nakal di UPT Tengku Yuk	79.879.759	79.840.000	99,95%
	Pelayanan sosial adopsi anak	2.564.000	2.564.000	100,00%
	Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center	268.027.000	261.985.100	97,75%
	Peningkatan Kualitas Assesment Manajemen Kasus	-	-	-
	Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas	-	-	-
	Rehabilitas Prasarana dan Sarana Panti Rehabilitasi Sosial Anak yang Dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (DAK)	-	-	-
Program Pemberdayaan Sosial	Penyuluhan Sosial Provinsi Riau	1.871.000	1.871.000	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Forum CSR Kesos Provinsi Riau	1.993.000	1.993.000	100,00%
	Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Provinsi Riau	1.998.600	1.998.600	100,00%
	Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	143.141.795	137.570.700	96,11%

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	307.124.870	171.719.000	55,91%
	Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo dan HKSNI Provinsi	-	-	-
Program Penanganan Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin	50.000.000	48.620.000	97,24%
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan E-Waroeng di Provinsi Riau	-	-	-
Ekonomis		9.177.704.529	8.809.167.124	95,98%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio ekonomis Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2020 adalah 95,98% dengan perhitungan terkecil sebesar 55,91% yaitu pada kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Perhitungan terbesar adalah 100% yaitu pada kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pelayanan sosial adopsi anak, Penyuluhan Sosial Provinsi Riau, Peningkatan Kapasitas Forum CSR Kesos Provinsi Riau, dan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Provinsi Riau.

4.2.2 Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Kegiatan dikatakan efisien apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan dana yang minimum.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase realisasi fisik dari program

Angka *output* yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

Input : Persentase realisasi keuangan program

Angka *input* yang dimaksud adalah persentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari Dinas Sosial Provinsi Riau.

Berikut ini ialah perhitungan rasio efisiensi pada Dinas Sosial Provinsi Riau periode 2019-2020.

Tabel 4.8
Perhitungan Efisiensi
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
Program Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100,00%	83,15%	120,26%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00%	99,01%	101,00%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100,00%	91,66%	109,10%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	97,87%	102,18%
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	100,00%	89,33%	111,95%

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100,00%	84,61%	118,19%
	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	100,00%	96,97%	103,13%
	Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	100,00%	70,36%	142,12%
	Penyediaan Pelayanan Pameran Riau Expo	100,00%	0,00%	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	0,00%	-
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,00%	78,97%	126,63%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	63,52%	63,52%	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	98,36%	101,67%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang UPT. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	100,00%	91,39%	109,42%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah	100,00%	89,02%	112,33%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk	100,00%	92,03%	108,66%
	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	100,00%	86,74%	115,28%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Bina Laras	100,00%	100,00%	100,00%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak	100,00%	95,25%	104,98%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan sosial adopsi anak	64,96%	64,96%	100,00%
	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam Panti se Provinsi Riau	20,66%	20,66%	100,00%
	Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center	100,00%	81,78%	122,29%
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	12,71%	12,71%	100,00%
	Kemitraan dalam Penanganan Pasung	17,78%	17,78%	100,00%
	Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus	100,00%	76,01%	131,57%
	Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas	100,00%	82,38%	121,39%
Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik	100,00%	92,34%	108,30%
	Pelayanan Sosial Bagi Disabilitas pada Panti Disabilitas	41,21%	41,21%	100,00%
	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar melalui Panti	100,00%	88,12%	113,48%
	Pelayanan Sosial Bagi Anak Remaja Nakal di Upt Tengku Yuk	48,12%	48,38%	99,46%
	Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Terlantar melalui Panti	100,00%	83,75%	119,41%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Pengelolaan Data Fakir Miskin	100,00%	71,95%	138,99%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
	Validasi Data Kartu KKS	100,00%	98,80%	101,22%
	Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin Pembinaan Pendamping Sosial	14,61%	14,61%	100,00%
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan E-Waroeng Di Riau	100,00%	99,82%	100,18%
	Kesetiakawanan sosial nasional EXPO dan HKSN Provinsi	-	-	-
	Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan	-	-	-
	Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	93,72%	106,70%
	Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Se- Provinsi Riau	100,00%	77,38%	129,23%
	Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan	100,00%	92,40%	108,23%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100,00%	83,55%	119,69%
	Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna	100,00%	94,69%	105,61%
	Penyuluhan Sosial Provinsi Riau	100,00%	97,75%	102,30%
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100,00%	95,95%	104,22%
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial	100,00%	93,76%	106,65%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	-	-	-

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor	100,00%	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100,00%	88,64%	112,81%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100,00%	95,69%	104,50%
	Penyediaan Sarana Kearsipan	100,00%	99,31%	100,70%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah	100,00%	99,83%	100,17%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk	100,00%	99,69%	100,31%
	Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan	100,00%	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	100,00%	99,62%	100,38%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	51,80%	51,80%	100,00%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak	100,00%	79,07%	126,48%
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana UPT. Bina Laras	-	-	-
	Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan	100,00%	74,44%

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
	Pelayanan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial	1,71%	1,71%	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana	69,95%	69,95%	100,00%
	Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal	62,26%	62,26%	100,00%
	Pelayanan Sosial Rumah Singgah	100,00%	98,51%	101,51%
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	100,00%	91,66%	109,10%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	34,19%	34,19%	100,00%
Program Pengembangan Data/Informasi	Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi	100,00%	81,46%	122,76%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	100,00%	97,22%	102,86%
	Efisiensi	87,55%	76,65%	114,22%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efisiensi Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2019 adalah 114,22% dengan perhitungan terkecil sebesar 99,46% yaitu pada kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Anak Remaja Nakal di UPT Tengku Yuk dan Perhitungan terbesar adalah 138,99% yaitu pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin.

Peneliti juga mengukur perhitungan rasio efisiensi pada program atau kegiatan pada tahun 2020. Berikut ini adalah perhitungan rasio efisiensi pada program atau kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2020.

Tabel 4.9
Perhitungan Efisiensi
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
Program Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	98,62%	101,39%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,00%	97,55%	102,51%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00%	99,41%	100,59%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	99,50%	100,50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	99,97%	100,03%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00%	100,00%	100,00%
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,00%	98,90%	101,11%
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	100,00%	98,76%	101,26%
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100,00%	98,07%	101,97%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan		100,00%	99,09%	100,92%
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas		100,00%	97,38%	102,69%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100,00%	99,75%	100,25%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Daerah Provinsi	100,00%	99,50%	100,50%
	Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana	-	-	-

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
	Peningkatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Graduan Penerima Jaminan Sosial	-	-	-
	Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal	100,00%	99,66%	100,34%
	Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	-	-	-
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100,00%	96,27%	103,88%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Mental di Dalam Panti	100,00%	98,25%	101,78%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100,00%	92,70%	107,87%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100,00%	99,00%	101,01%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Dalam Panti	92,81%	86,74%	106,99%
	Pelayanan Sosial bagi Anak Remaja Nakal di UPT Tengku Yuk	100,00%	99,95%	100,05%
	Pelayanan sosial adopsi anak	100,00%	100,00%	100,00%
	Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center	100,00%	97,75%	102,31%
	Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus	-	-	-
	Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas	-	-	-
	Rehabilitas Prasarana dan Sarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak yang Dimiliki oleh Pemerintah Provinsi	-	-	-

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PROGRAM	KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	%
Program Pemberdayaan Sosial	Penyuluhan Sosial Provinsi Riau	100,00%	100,00%	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Forum CSR Kesos Provinsi Riau	100,00%	100,00%	100,00%
	Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Provinsi Riau	100,00%	100,00%	100,00%
	Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	96,11%	104,05%
	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	65,28%	55,91%	116,76%
	Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo dan HKSNI Provinsi	-	-	-
Program Penanganan Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin	100,00%	97,24%	102,84%
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan E-Warong di Provinsi Riau	-	-	-
Efisiensi		99,67%	95,98%	103,84%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efisiensi Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2020 adalah 103,84% dengan perhitungan terkecil sebesar 100% yaitu pada kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pelayanan Sosial Adopsi Anak, Penyuluhan Sosial Provinsi Riau, Peningkatan Kapasitas Forum CSR Kesos Provinsi Riau, dan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Provinsi Riau dan Perhitungan terbesar adalah

116,76% yaitu pada kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

4.2.3 Efektivitas

Mengukur rasio efektivitas yaitu memperoleh tingkat pencapaian pada hasil dari program yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Sasaran program atau kegiatan bisa dikatakan efektif jikalau hasil *output* lebih besar dibandingkan hasil *outcome* maka hasil yang telah didapatkan mampu melebihi target yang akan dicapai.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Capaian sasaran

Angka *outcome* yang dimaksud adalah capaian sasaran pelaksanaan program atau kegiatan.

Output : Target sasaran

Angka *output* yang dimaksud adalah target sasaran dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

Berikut ini ialah perhitungan rasio efektivitas pada Dinas Sosial Provinsi Riau periode 2019-2020.

Tabel 4.10
Perhitungan Efektivitas
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2019

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Capaian sasaran	%
------------------	-------------------	----------------	-----------------	---

Peningkatan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	1.713 Orang	1.438 Orang	83,94%
Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Riau	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	3.169 Orang	822 Orang	25,93%
Efektivitas				54,94%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efektivitas Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2019 adalah 59,94% dengan perhitungan terkecil sebesar 25,93% yaitu pada indikator kinerja Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dan perhitungan terbesar adalah 83,94% yaitu pada indikator kinerja Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sosial.

Peneliti juga mengukur perhitungan rasio efektivitas pada sasaran strategi pada tahun 2020. Berikut ini adalah perhitungan rasio efektivitas pada sasaran strategi Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2020.

Tabel 4.11
Perhitungan Efektivitas
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2020

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Sasaran	Capaian Kinerja	%
Peningkatan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	540 Orang	493 Orang	91,29%
Peningkatan Peran PSKS dalam pembangunan bidang	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang	-	-	-

kesejahteraan sosial di Provinsi Riau	diberdayakan			
Efektivitas				45,65%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efektivitas Dinas Sosial Provinsi Riau pada Tahun 2020 adalah 45,65% dengan perhitungan terkecil yaitu pada indikator kinerja Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan yang tidak terlaksana dan Perhitungan terbesar adalah 91,29% yaitu pada indikator kinerja Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sosial.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan rasio *value for money* terhadap hasil perhitungan kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau melalui rasio ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Berikut ini pembahasan dari hasil perhitungan Dinas Sosial Povinsi Riau pada tahun 2019-2020.

4.3.1 Ekonomis

Pada Tahun 2019 perhitungan ekonomis dari semua program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 76,65% berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dinyatakan ekonomis.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil dari perhitungan ekonomis yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 95,98% berdasarkan kriteria penilaian ekonomis yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2020 dinyatakan ekonomis.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan dari kriteria penilaian ekonomis yang telah ditetapkan maka hasilnya dinyatakan ekonomis karena nilai presentase kurang dari 100%.

Hasil dari perhitungan rasio ekonomis pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 19,33%. Terjadinya kenaikan rasio ini jika dinilai dari segi ekonomis maka pada tahun 2020 telah terjadi pengurangan anggaran sebesar 19,33% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa rasio ekonomis Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana/tercapai, hal itu dikarenakan belum maksimalnya penyerapan anggaran beberapa program disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan rencana kegiatan, rasionalisasi anggaran yang menyebabkan penyesuaian terhadap arus kas pada anggaran perubahan serta keterlambatan administrasi lainnya.

4.3.2 Efisiensi

Pada Tahun 2019 perhitungan efisiensi dari semua program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 114,22% berdasarkan kriteria penilaian efisiensi yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dinyatakan efisien.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil dari perhitungan efisiensi yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 103,84% berdasarkan kriteria

penilaian efisiensi yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2020 dinyatakan efisien.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan dari kriteria penilaian efisiensi yang telah ditetapkan maka hasilnya dinyatakan efisien karena nilai presentase lebih dari 100%.

Hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,38% hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2020 terjadinya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga belanja untuk pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat terlaksana sepenuhnya dan hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Riau kurang mampu menghemat dana anggaran dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mendapatkan *output* yang maksimal. Jadi konsep dari efisiensi ini jika suatu program/kegiatan dikatakan efisien jika *output* yang dihasilkan lebih besar dari penggunaan sumber daya dengan dana yang serendah-rendahnya, dengan asumsi bila realisasi fisik yang telah dicapai oleh suatu instansi lebih besar daripada realisasi keuangan yang ditetapkan maka rasio efisiensi yang dihasilkan akan semakin besar. Walaupun demikian kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 masih tetap dikatakan baik karena dapat memenuhi konsep dari efisiensi dengan menghasilkan *input* yang minimum dengan *output* yang maksimal.

Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana/tercapai, dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran Dinas Sosial Provinsi Riau yang tidak luput dari rasionalisasi anggaran. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pada petunjuk operasional kegiatan dan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan.

4.3.3 Efektivitas

Pada tahun 2019 perhitungan efektivitas dari semua program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 59,94% berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dinyatakan tidak efektif.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil dari perhitungan efektivitas yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebesar 45,65% berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang ditetapkan maka program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2020 dinyatakan tidak efektif.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan dari kriteria penilaian efektivitas yang telah ditetapkan maka hasilnya dinyatakan tidak efektif karena nilai presentase kurang dari 100%.

Hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,29% hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau mengalami penurunan kinerja untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 pelaksanaan program/kegiatan anggaran dirasionalisasikan sehingga belanja untuk

kegiatan tidak dapat terlaksana seluruhnya, dan dari hasil verifikasi penerima bantuan tahun 2020 juga tidak banyak yang bersifat *accidental* atau pada saat terjadinya kasus sehingga tidak bisa diperkirakan berapa yang bisa dibantu atau dilayani. Dalam tahun 2019 dan 2020 kinerja Dinas Sosial provinsi Riau dinyatakan tidak baik atau tidak efektif karena tidak memenuhi kriteria penilaian efektivitas yang capaian efektivitasnya berada dibawah 100%.

4.3.4 Hasil Pembahasan

Dari perhitungan ketiga rasio *value for money* yang telah dibahas, kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum memenuhi prinsip *value for money*, karena:

1. Rasio ekonomis dikatakan baik dalam menjalankan programnya karena menurut kriteria penilaian ekonomis yang telah ditetapkan, hasil perhitungannya kurang dari 100% yang mana itu artinya dinyatakan ekonomis.
2. Rasio efisiensi juga dikatakan baik dalam menjalankan program/kegiatannya karena menurut kriteria penilaian efisiensi yang telah ditetapkan, hasil perhitungannya lebih besar dari 100% yang mana itu artinya dinyatakan efisiensi.
3. Sedangkan rasio efektivitas Dinas Sosial Provinsi Riau masih belum dikatakan baik karena kinerja program yang dijalankan mengalami penurunan dan jika menurut kriteria penilaian efektivitas yang telah ditetapkan, hasil perhitungannya kurang dari 100% yang mana itu artinya dinyatakan tidak efektif. Hal ini juga disebabkan oleh Covid-19

sehingga belanja untuk pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat terlaksana seluruhnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pengukuran menggunakan prinsip *value for money*, maka peneliti menyatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money* dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari rasio ekonomis program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan tahun 2020 dinyatakan ekonomis dengan rasio ekonomis tahun 2019 sebesar 76,65% dan tahun 2020 sebesar 95,98%.
2. Ditinjau dari rasio efisiensi program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan tahun 2020 dinyatakan efisien dengan rasio efisiensi tahun 2019 sebesar 114,22% dan tahun 2020 sebesar 103,84%.
3. Ditinjau dari rasio efektivitas sasaran strategis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau pada tahun 2019 dan tahun 2020 dinyatakan tidak efektif dengan rasio efektivitas tahun 2019 sebesar 59,94% dan tahun 2020 sebesar 45,65%.

5.2 Saran

1. Dinas Sosial Provinsi Riau

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap Dinas Sosial Provinsi Riau dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja

dengan lebih memperhatikan prinsip *value for money* sehingga dapat mengevaluasi dan mengelola kinerja dengan lebih optimal dimasa mendatang. Diharapkan juga Dinas Sosial Provinsi Riau dapat membuat pelaksanaan program/kegiatan dengan tepat sasaran sehingga dampaknya dapat terlihat dengan sesuai.

2. Peneliti Lainnya

Lalu untuk peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti kinerja keuangan dengan menggunakan data yang lebih banyak atau lebih lengkap agar hasil penelitian dapat mendekati kebenaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Tri Astuti. (2011). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang*. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Agustin, R. D., dan Subardjo, A. (2017). *Konsep value for money dalam mengukur kinerja pelayanan sektor publik*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Arifani, Cindy., Agustinus Salle, dan Andika Rante. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(1).
- Bastian, Indra (2019). *Modul 1 Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Dwinanda, Yosie. (2018). *Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Fadilla, Della. (2021). *Analisis Value For Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.
- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, Asrob. (2017). *Analisis kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan konsep Value For Money*. (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Husna, Yulia Nurhanifah (2020). *Analisis Value For Money dalam pengukuran kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh periode 2017-2018 Timur*. (Doctoral dissertation, IAIN Batusangkar).
- Indarayani dan khairunnisa. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan konsep value for money pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Studi kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*. *Jurnal akuntansi dan keuangan*,6(1).
- Khairunnisa, A. (2021). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Komariah, Aan., dan Djam'an Satori (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Liando, Harry Saputra, David Paul Elia Saerang., dan Inggriani Elim. (2014). *Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe menggunakan metode Value For Money*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3).
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta; BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; Andi
- Nordiawan, Deddy. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta
- Polii, Imanuel R.A., Davied P.E Saerang., dan Steven J Tangkuman (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4).
- Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. From <https://peraturan.bpk.go.id>
- Putri, Felia. (2021). *Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.
- Putri, Nur Zeni. Amilia. (2020). *Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ritonga, Fitriyah. (2021). *Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Riau.
- Sakinah, Devi Aprilia. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Value For Money Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Periode 2017-2018*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Sipahelut, Riana Christy., Sri Murni., dan Paulina Van Rate (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2016)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(3).
- Solihin, Deni. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Value For Money pada Politeknik TEDC Bandung (Periode 1 September 2017 s/d 31 Agustus 2018)*. Jurnal TEDC, 13(2)

Sulisworo, Dwi. (2009). *Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta

Trilaksono, Benny Agus., dan Nur Handayani (2020). *Analisis Value For Money dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau